

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Organisasi : Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2019.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

B. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Kegiatan ini sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Badan Pendapatan agar potensi sumber daya Aparatur semakin meningkat dan profesional serta kemampuan dalam menggali sumber pendapatan daerah lebih baik
- Tujuan : Sebagai cara guna mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ;
Sebagai salah satu daerah otonom di Sumatera Barat yang diberikan hak dan kewajiban serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai kewenangan yang dimiliki untuk menggali berbagai sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayahnya.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2019 berlokasi di tempat sesuai dengan undangan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan.

B. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut ;

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Penanggungjawab Program / Pengguna Anggaran | : | Kepala Badan Pendapatan |
| 2. Kuasa Pengguna Anggaran | : | Sekretaris Badan Pendapatan |
| 3. Penjabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Staf Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan |
| 4. Bendahara Pengeluaran | : | Staf Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan |
| 5. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan |

D. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2019 dilakukan seiring dengan undangan dari Kementerian Keuangan.

E. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam waktu 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2019 sesuai undangan.

F. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2019 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019, dengan jumlah sebesar Rp7.250.000,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2019

1. Nama Kegiatan : Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp7.250.000,00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2019)
3. Keluaran / Output :
 - ❖ Tersedianya 3 orang penilai dan 3 orang pemeriksa pajak.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Terlaksananya Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Manfaat / Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah untuk 12 bulan kerja (1 tahun)
6. Dampak ;
 - ❖ Meningkatnya mutu pelayanan pajak.

Diketahui / Disetujui oleh ;
Kuasa Pengguna Anggaran /KPA
Badan Pendapatan Kab.Pesisir Selatan

HELLEN H SARI,SE.AK.M.Ec.Dev
Nip. 19780528 200501 2 004

Painan, Januari 2019

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ANDREAS ADITYA,SS.
NIP. 19861206 201502 1 001